

# **Analisis Tentang Pelaksanaan Otonomi Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau**

Oleh:

Rian Juli Purwani<sup>1)</sup>, Ahmad Eddison<sup>2)</sup>, Zahirman<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswi Program Studi PKn Universitas Riau

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi PKn Universitas Riau

Jln. Binawidya kilometer 12 Kampus Unri Panam

Hp: 081270635057

## ***Abstract***

*The study is based on existence of sAutonomy Analysis On Improvement Of Rural Development In Rural District Sanglar Durai Karimun Regency Riau Islands. Formulation of the problem in this research is "How to increase decentralization village development district sanglar village sub durai karimun Riau islands ". This study aims to identify and analyze how the implementation of village autonomy to increased development in villages sanglar durai sub district Riau islands karimun. The research was conducted which in August 2012 to the month of september 2012. The population in this study is a rural community of 1833 people sanglar. While the technique of sampling using sampling purposive by sugoyono the sampling techniques with particular reference to the number 100. Data were collected through observations, questionnaires, interviews, and engineering libraries. Data analysis using descriptive qualitative. The hypothesis in this study is from the pretty village autonomy has increased development in rural counties sanglar sub durai karimun Riau islands.*

*The results of this study indicate that 33.5% if the review of the opinion in which the analysis suriso hadi is quite good and it ranged between 33.34% - 66.66%. The hypothesis that there is the "Analysis About Autonomy Against Rural Development Improvement District in rural Sanglar Karimun Riau Good Enough", accepted or proven. It can be concluded that the implementation of Autonomy Analysis On The Good Enough Against Rural Development In Rural Improvement District Sanglar Durai Karimun Regency Riau Islands.*

*Key words: analysis of village autonomy, rural development, rural*

## **A. PENDAHULUAN**

Desa memiliki hak untuk mengurus atau mengatur rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus atau mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan

nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Otonomi desa pada dasarnya mempunyai peranan yang strategis, ketika saat ini kita semua sedang mengusung ide pembangunan yang berbasis kerakyatan/masyarakat, pemberdayaan. Desa adalah basis masyarakat dengan segala problematikanya. Kemiskinan ada di desa, akan tetapi di desa pula basis sebagai potensi bisnis ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia juga tinggal di desa. Dalam kerangka konseptual pemikiran ini lah, maka konsep pengembangan otonomi desa adalah alternatif yang pantas di evaluasi yang berperan strategis dalam sistem pertahanan nasional.

Berlandaskan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan otonomi desa terhadap peningkatan pembangunan didesa sanglar kecamatan durai kabupaten karimun kepulauan riau. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan otonomi desa terhadap peningkatan pembangunan didesa sanglar kecamatan durai kabupaten karimun kepulauan riau.

Berlandaskan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Analisis Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Didesa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Didesa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau dan waktu penelitian penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli 2012 sampai bulan Desember 2012.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau sebanyak 1833 orang. Dalam pengambilan sampel digunakan purposive sampling, menurut sugiyono purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (sugiyono,2003dalam skripsi nurlia dewi : 2011:24)

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat desa, perangkat desa, tokoh pemuda/mahasiswa.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Sampel**

No	Kategori sampel	Jumlah (orang)
1.	Masyarakat desa	80
2.	Perangkat desa	10
3.	Tokoh pemuda/mahasiswa	10
Jumlah		100

(dalam skripsi nurlia dewi:2011:25)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu dengan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan dalam mengumpulkan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Observasi, Wawancara, Angket, Dokumentasi dan Kepustakaan.

Dengan telah terkumpulnya data, baik data berupa catatan dari wawancara maupun hasil angket yang akan dijawab para responden secara tertulis/ lisan yang didapat dilapangan akan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisa yang nantinya akan menggambarkan pelaksanaan otonomi desa secara konkrit sesuai dengan data yang terkumpul. Karena penelitian bersifat deskriptif kualitatif jadi pengolahan data hanya dianalisa menurut isinya dengan rumus yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Besar persentase alternatif jawaban

F: Frekuensi alternatif jawaban

N: Jumlah sampel penelitian (Sudjono,2003:40)

Hasil disajikan dalam bentuk tabel dan dapat ditarik kesimpulan untuk mengetahui hasil analisis dari pelaksanaan otonomi desa terhadap peningkatan pembangunan desa sanglar kecamatan durai kabupaten karimun kepulauan riau. Maka diberi pertanyaan yang mempunyai beberapa alternatif jawaban yaitu:

- |                       |                      |                     |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Sering             | 1. Sangat mengetahui | 1. Sangat mendukung |
| 2. Kadang-kadang      | 2. Mengetahui        | 2. Mendukung        |
| 3. Tidak pernah       | 3. Kurang mengetahui | 3. Kurang mendukung |
| 1. Sangat berpengaruh | 1. Sangat sejahtera  | 1. Sangat layak     |
| 2. Berpengaruh        | 2. Sejahtera         | 2. Layak            |
| 3. Kurang berpengaruh | 3. Kurang sejahtera  | 3. Kurang layak     |

Hasil analisis dikelompokkan berdasarkan deskriptif kualitatif menurut persentasi jawaban responden tolok ukur dalam pengambilan kesimpulan. Adapun tolok ukur tersebut sebagai berikut:

- 0% - 33,33% = Kurang Baik
- 33,34% – 66,66% = Cukup Baik
- 66,67% - 100% = Baik (Sutrisno Hadi, 1999: 226)

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penelitian ini penulis menyebarkan angket sebanyak 100 angket, kemudian angket tersebut diberikan kepada masyarakat 80 angket, perangkat desa 10 angket, tokoh pemuda/mahasiswa 10 angket.

#### Pengetahuan Masyarakat mengenai Otonomi Desa

Otonomi Desa adalah otonomi asli yang ada sejak desa itu terbentuk (tumbuh di dalam masyarakat) dan bersumber dari hukum adat yang mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa. Otonomi Desa bukan berasal dari pemberian pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi tetapi diperoleh secara tradisional. Otonomi Desa merupakan suatu *condition sine quanon* (sesuatu yang tidak dapat tidak ada). Tanpa adanya otonomi, maka organisasi pemerintahan terendah itu bukan lagi desa. Desa selalu mengandung unsur otonomi. Hilangnya otonomi berarti hilangnya sifat khas dan ciri desa, dengan kata lain wilayah itu tidak merupakan desa lagi (Bayu Suryaningrat, 1985).

Oleh sebab itu masyarakat perlu mengetahui bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa sanglar merupakan bagian dari otonomi desa yakni otonomi asli yang tidak dapat dikatakan tidak ada. Pengetahuan masyarakat perlu di uji agar mereka mampu memahami bahwa segala aktifitas adat dan pembangunan yang dilakukan di desa tersebut merupakan atas dasar dari semangat gotoroyong masyarakat itu sendiri bukan sepenuhnya pemberian dari pemerintah daerah.

#### Mengetahui Otonomi Desa

Berdasarkan hasil penelitian, apakah masyarakat mengetahui tentang otonomi desa dapat dilihat pada tabel 4.3.1.1 berikut ini :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mengetahui	4	4
Mengetahui	37	37
Kurang mengetahui	59	59
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui tentang otonomi desa di lihat dari pengetahuan masyarakat atau responden kurang baik. Dari 100 responden 4 orang (4%) menjawab sangat mengetahui, yang menjawab mengetahui 37 orang (37%) dan yang menjawab kurang mengetahui 59 orang (59%).

Dengan demikian dapat di simpulkan pengetahuan masyarakat tentang otonomi desa kurang baik. Hal ini dilihat dari tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa segala aktifitas adat dan pembangunan desa yang berasal dari hasil swadaya masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari otonomi desa atau otonomi asli bukan sepenuhnya pemberian bantuan dari pemerintah daerah.

### Sosialisasi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, apakah pemerintah kabupaten karimun sering melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan otonomi desa di desa sanglar dapat dilihat pada tabel 4.3.1.2 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	8	8
Kadang-kadang	67	67
Tidak pernah	25	25
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui tentang sosialisasi pelaksanaan otonomi desa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten karimun dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 8 orang atau (8%) menjawab sering, 67 orang atau (67%) menjawab kadang-kadang, 25 orang atau (25%) menjawab tidak pernah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang usaha pemerintah terhadap sosialisasi mengenai otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan masih butuhnya masyarakat dalam memahami tentang otonomi desa.

### Ikut Upaya Sosialisasi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, apakah masyarakat sering mengikuti upaya pemerintah dalam mensosialisasikan pelaksanaan otonomi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.3:

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	25	25
Kadang-kadang	30	30
Tidak pernah	45	45
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang ikut upaya pemerintah dalam mensosialisasikan pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat kurang baik. Dari 100 responden 25 orang atau (25%) menjawab sering, 30 orang atau (30%) menjawab kadang-kadang, dan 45 orang atau (45%) menjawab tidak pernah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ikut upaya pemerintah dalam mensosialisasikan pelaksanaan otonomi desa kurang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat desa sanglar memiliki pekerjaan sebagai nelayan sehingga sebagian besar masyarakat yang mengetahui tentang otonomi desa sempat membantu pemerintah untuk mensosialisasikan pelaksanaan otonomi desa.

### Memahami Otonomi Desa

Berdasarkan hasil penelitian, apakah masyarakat memahami otonomi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.4 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat memahami	5	5
Memahami	35	35
Kurang memahami	60	60
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang memahami tentang otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 5 orang atau (5%) menjawab sangat memahami, 35 orang (35%) menjawab memahami, dan yang menjawab kurang memahami 60 orang atau (60%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai otonomi desa cukup baik. Masyarakat harus memahami otonomi desa sehingga mereka mampu mengubah desanya menjadi lebih maju dan berkembang karena otonomi desa merupakan otonomi asli yang memang sudah ada pada desa.

#### Peran Aktif Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan otonomi desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini 4.3.1.5 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	15	15
Kadang-kadang	9	9
Tidak pernah	76	76
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat kurang baik. Dari 100 responden 15 orang atau (15%) menjawab sering, 9 orang atau (9%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 76 orang atau (76%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan otonomi desa kurang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat yang ikut aktif merupakan staf desa sehingga masyarakat yang lain hanya sebagai sumbangan tenaga apabila ada bantuan dalam bergotoroyong membersihkan atau membangun desa.

#### Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, apakah masyarakat sering ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan otonomi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.6 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	32	32
Kadang-kadang	55	55
Tidak pernah	13	13
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 32 orang atau (32%) menjawab sering, 55 orang atau (55%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 13 orang atau (13%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi terhadap pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat masih memiliki rasa kekeluargaan untuk bersama-sama membangun dan membentuk desa menjadi lebih maju serta berkembang.

#### Hambatan pelaksanaan otonomi desa

Berdasarkan hasil penelitian, apakah pelaksanaan otonomi desa sering mendapat hambatan dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.7 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	57	57
Kadang-kadang	35	35
Tidak pernah	8	8
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hambatan dari pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 57 orang atau (57%) menjawab sering, 35 orang atau (35%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 8 orang atau (8%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hambatan dari pelaksanaan otonomi desa menurut masyarakat yang mengetahui cukup baik. Hal ini menunjukkan masyarakat yang peduli setiap perkembangan pembangunan yang dilaksanakan di desa sanglar, masyarakat menyadari bahwa jarak tempuh dari pemerintah cukup jauh.

#### Mendukung program pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, apakah masyarakat mendukung program pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi desa di desa sanglar dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.8:

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mendukung	73	73
Mendukung	27	27
Kurang mendukung	0	0
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat baik. Dari 100 responden 73 orang atau (73%) menjawab sangat mendukung, 27 orang atau (27%) menjawab mendukung, dan yang menjawab tidak mendukung 0 orang atau (0%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa baik. Hal ini dikarenakan masyarakat juga membantu pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa karena kemampuan SDM juga harus memiliki pengetahuan tentang otonomi desa agar mereka bisa hidup mandiri tanpa sepenuhnya harus pemerintah yang bergerak dalam pembangunan.

#### Mengetahui hambatan yang di rasakan kepala desa

Berdasarkan hasil penelitian, apakah masyarakat mengetahui hambatan yang dirasakan kepala desa dalam pelaksanaan otonomi desa di desa sanglar dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.9 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mengetahui	65	65
Mengetahui	20	20

Kurang mengetahui	15	15
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui hambatan kepala desa dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 65 orang atau (65%) menjawab sangat mengetahui, 20 orang atau (20%) menjawab mengetahui, dan yang menjawab kurang mengetahui 15 orang atau (15%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengetahui hambatan yang dirasakan kepala desa dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Masyarakat merupakan orang-orang yang paling dekat dengan kepala desa sehingga sebagian dari masyarakat mengetahui hambatan-hambatan yang dirasakan kepala desa dalam proses pembangunan karena segala sesuatu kesulitan yang dihadapi kepala desa juga melakukan tukar pikiran serta pendapat dari masyarakat untuk memajukan desa mereka.

**Pengaruh peningkatan pembangunan**

Berdasarkan hasil penelitian, apakah ada pengaruh peningkatan pembangunan di desa sanglar terhadap pelaksanaan otonomi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.10 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat berpengaruh	15	15
Berpengaruh	63	63
Kurang berpengaruh	22	22
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang merasakan pengaruh peningkatan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 15 orang atau (15%) menjawab sangat berpengaruh, 63 orang atau (63%) menjawab berpengaruh, dan yang menjawab kurang berpengaruh 22 orang atau (22%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang merasakan pengaruh dari peningkatan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari adanya pembangunan di desa sanglar baik itu pembangunan jalan, pelabuhan tempat ibadah dan lain sebagainya.

**Bantuan sarana dan prasarana pendidikan**

Sarana dan prasarana pendidikan memang sangat di butuhkan setiap siswa-siswi di sekolah agar mereka memiliki pengetahuan yang sama dengan siswa/i lain di daerah perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian, apakah pemerintah sering memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan di desa sanglar dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.11 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	34	34
Kadang-kadang	55	55
Tidak pernah	11	11
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 34 orang atau (34%) menjawab sering, 55 orang atau (55%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 11 orang atau (11%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengetahui bantuan pendidikan yang di berikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak hanya sibuk dalam melaksanakan pekerjaan sebagai nelayan namun mereka juga sangat memperdulikan nasib pendidikan untuk anak-anak mereka.

### **Pemahaman Masyarakat Mengenai Pembangunan**

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik yang berarti pembangunan berupa jalan, rumah ibadah, MCK, puskesmas, sekolah dan lain-lain yang menjadi kebutuhan masyarakat. pembangunan pendidikan dapat berupa fasilitas belajar seperti pustaka, kursi, meja, yang layak digunakan dan memiliki tenaga pengajar yang cukup. Pembangunan kesehatan dapat berupa perlengkapan pengobatan dan balai kesehatan. Pembangunan kesejahteraan dapat berupa lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan lahan sebagai tempat pertanian.

Oleh sebab itu masyarakat harus memahami bahwa pembangunan memiliki beberapa bidang untuk meningkatkan kesejahteraan desa dengan mengasah kemampuan dari SDM dan memanfaatkan SDA di desa tersebut.

Memanfaatkan pembangunan

Pembangunan yang telah didirikan di desa sanglar berupa pelabuhan, MCK (Mandi cuci kakus), masjid, sekolah dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian apakah masyarakat sering memanfaatkan pembangunan yang ada dari pelaksanaan otonomi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.12 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	13	13
Kadang-kadang	36	36
Tidak pernah	51	51
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang memanfaatkan pembanguan dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 13 orang atau (13%) menjawab sering, 36 orang atau (36%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 51 orang atau (51%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan pembanguana dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengabaikan atas apa yang telah dibangun didesa mereka bahwa pembangunan yang sudah didirikan bisa dimanfaatkan demi kemudahan dalam beraktifitas sehari-hari.

Gotoroyong

Gotoroyong merupakan semangat kerjasama untuk membersihkan dan membangun desa dan tempat tinggal. Berdasarkan hasil penelitian apakah masyarakat desa sanglar ikut bersimpati untuk bergotoroyong bersama membangun desa dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.13 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	57	57
Kadang-kadang	31	31
Tidak pernah	12	12
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang ikut bergotoroyong dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 57 orang atau (57%) menjawab sering, 31 orang atau (31%) menjawab kadang-kadang, dan 12 orang atau (12%) menjawab tidak pernah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semangat gotoroyong masyarakat untuk membangun desa dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat desa sanglar memiliki rasa kekeluargaan dan kerjasama yang baik demi membangun desa yang sejahtera.

Lapangan pekerjaan

Lapangan pekerjaan memang sangat dibutuhkan masyarakat desa sanglar mereka tidak hanya menjadi nelayan namun masyarakat bisa memiliki pekerjaan lain dengan memanfaatkan lahan apabila pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pertanian dengan mengasah kemampuan SDM di desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, apakah pemerintah sering memberikan bantuan lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di desa sanglar dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.14 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	14	14
Kadang-kadang	22	22
Tidak pernah	64	64
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui bantuan lapangan pekerjaan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat kurang baik. Dari 100 responden 14 orang atau (14%) menjawab sering, 22 orang atau (22%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 64 orang atau (64%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan lapangan pekerjaan yang di berikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa kurang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang dibekali ilmu mengenai tata cara menanam karet karena pemerintah memang sudah memverikan bantuan berupa pohon karet kepada masyarakat namun tidak didukung dengan sosialisasi hal ini dikarenakan letak desa sangat jauh dari pemerintah.

Hidup sejahtera

Berdasarkan hasil pnelitian, apakah masyarakat didesa sanglar kehidupannya lebih sejahtera dengan adanya pelaksanaan otonomi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.15 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sejahtera	18	18
Sejahtera	44	44
Kurang sejahtera	38	38
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang merasakan hidup sejahtera dari pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 18 orang atau (18%) menjawab sering, 44 orang atau (44%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 38 orang atau (38%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang merasakan hidup sejahtera dari pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat juga merasakan manfaat setelah pembangunan di desa sanglar mengalami peningkatan karena memudahkan bagi mereka dalam hal transportasi untuk berdagang dan usaha lain.

#### Bantuan perlengkapan nelayan

Perlengkapan nelayan masyarakat membutuhkan biaya yang cukup besar ini hanya bisa dimiliki oleh sebagian masyarakat yang mampu namun ada beberapa masyarakat yang tidak sanggup memiliki perlengkapan tersebut sehingga kehidupan mereka hanya tergantung dari masyarakat lain. Berdasarkan hasil penelitian apakah pemerintah sering memberikan bantuan perlengkapan nelayan kepada masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.16 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	15	15
Kadang-kadang	57	57
Tidak pernah	28	28
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui bantuan perlengkapan nelayan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 15 orang atau (15%) menjawab sering, 57 orang atau (57%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 28 orang atau (28%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengetahui bantuan perlengkapan nelayan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat desa sanglar memiliki sikap saling peduli sangat tinggi bahwa perlengkapan nelayan bagi masyarakat kurang mampu memang sangat dibutuhkan karena mereka tidak hanya mencari rezeki selamanya bergantung dari orang lain.

#### Koperasi

Apabila koperasi di desa sanglar berjalan dengan lancar maka desa akan memiliki pemasukan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian apakah koperasi desa sanglar memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.17 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	13	13
Kadang-kadang	36	36
Tidak pernah	51	51
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui bantuan yang diberikan koperasi dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 13 orang atau (13%) menjawab sering, 36 orang atau (36%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 51 orang atau (51%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengetahui bantuan di berikan oleh koperasi dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan koperasi yang telah berjalan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Upaya pemerintah

Program yang dilakukan pemerintah terkadang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan hal ini dikarenakan jarak antara desa sanglar dengan pusat pemerintahan cukup jauh dan hanya bisa di tempuh dengan menggunakan transportasi laut. Berdasarkan hasil penelitian, apakah upaya pemerintah sering tidak terlaksana dengan baik terhadap kesejahteraan didesa sanglar dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.18 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	15	15
Kadang-kadang	36	36
Tidak pernah	49	49
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui upaya pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa sering tidak terlaksana dengan baik dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 15 orang atau (15%) menjawab sering, 36 orang atau (36%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 49 orang atau (49%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengetahui upaya pemerintah yang sering tidak terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak hanya duduk diam dan melihat kinerja pemerintah tapi mereka juga mengetahui kesulitan-kesulitan pemerintah terutama dalam hal transportasi yang jauh dan kadang-kadang membutuhkan dukunga cuaca dan kondisi gelombang laut.

Hidup bersih

Lingkungan yang bersih merupakan faktor penunjang untuk menarik perhatian pengunjung yang ingi berwisata didesa sanglar yang bisa dijadikan pemasukan dalam membangun desa yang berkembang dan sejahtera ini diperlukan dari kekompakan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat sering menerapkan hidup bersih dalam menjaga lingkungan yang sehat dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.19 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sering	22	22
Kadang-kadang	41	41
Tidak pernah	37	37
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menjalani hidup bersih dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 22 orang atau (22%) menjawab sering, 41 orang atau (41%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 37 orang atau (37%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang sudah menjalani hidup bersih untuk menjaga lingkungan desa dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat juga menyadari bahwa hidup bersih tidak hanya untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama.

Desa wisata

Objek wisata merupakan salah satu cara agar desa memiliki pemasukan dari pengunjung yang ingin berwisata, desa sanglar memiliki beberapa lokasi yang menarik untuk menjadi desa wisata hal ini karena kekayaan dan keunikan yang ada didesa tersebut bisa dijadikan tempat wisata. Berdasarkan hasil penelitian, apakah desa sanglar layak dijadikan desa wisata dalam pelaksanaan otonomi desa terhadap peningkatan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3.1.20 :

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat layak	42	42
Layak	27	27
Kurang layak	31	31
Jumlah	100	100

(sumber: data olahan 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengatakan desa sanglar layak sebagai desa wisata dalam pelaksanaan otonomi desa dilihat dari pengetahuan masyarakat cukup baik. Dari 100 responden 42 orang atau (42%) menjawab sering, 27 orang atau (27%) menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah 31 orang atau (31%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengatakan desa sanglar layak sebagai desa wisata dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat jug memahami kondisi desa mereka yang aman didatang para pengunjung untuk menikmati keindahan alam dan beberapa tempat wiata yang unik dan berbeda dari tempat lain.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Tentang Pelaksanaan Otonomi Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Didesa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dapat di buktikan dari penyebaran angket kepada masyarakat yang mengatakan mengetahui 37% serta didukung oleh wawancara yang di teliti langsung yakni ketua pemuda, ketua RT 1, kepala dusun 1, dan ustad masjid bahwa otonomi desa baru dikenal oleh sebagian masyarakat namun kurang memahami aturan dan kewenangan dari otonomi desa.

Dibuktikan dari penyebaran angket kepada masyarakat yang mengatakan kadang-kadang 35%. kemudian didukung oleh wawancara kepada objek yang di teliti bahwa letak desa sanglar yang cukup jauh dari pusat pemerintahan sehingga menghambat bantuan yang akan di berikan dari pemerintah yang hanya bisa di tempuh dengan transportasi laut dan harus sesuai dengan kondisi laut yang mendukung serta kemampuan SDM dalam mengelola SDA masih kurang.

Dibuktikan dari penyebaran angket kepada responden yang mengatakan berpengaruh 63% dan selanjutnya didukung oleh wawancara kepada objek penelitian. Bahwa setelah dilaksanakan otonomi desa pembangunan dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat baik dibidang fisik, kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.

Di buktikan dari penyebaran angket kepada responden yang mengatakan kadang-kadang 55% serta didukung oleh wawancara kepada objek penelitian. Bahwa masyarakat desa sanglar sangat berpartisipasi untuk bersama-sama membangun desa mereka yakni melalui swadaya masyarakat dalam membangun kios dan semangat gotoroyong masyarakat dalam membantu pemerintah di bidang pembangunan yang mengharapkan pembangunan yang sudah berjalan agar cepat diselesaikan.

Berdasarkan tolak ukur pada bab III pendapat sutrisno hadi (1999:226) menyatakan bahwa persentase sebesar 0%-33,33% = kurang baik, 33,34%-66,66% = cukup baik, dan 66,67%-100% = baik. Penulis mendapat rata-rata jawaban responden 35%-63% hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi desa cukup baik, diterima atau terbukti. Namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa dari Pelaksanaan Otonomi Desa Cukup Baik Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau melalui beberapa hal yakni pengetahuan masyarakat, hambatan yang dirasakan, pengaruh pembangunan dan partisipasi masyarakat mengenai otonomi desa dan pembangunan desa dapat diterima secara empirik hal ini terbukti dari hasil penelitian dengan persentase 35%-63% hasil ini sesuai dengan tolak ukur sebesar 33,33%-66,66% = cukup baik. Bahwa kategori ini tidak cukup menolak hipotesis yang menyatakan bahwa Analisis Tentang Pelaksanaan Otonomi Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Didesa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

Dari kesimpulan diatas, bahwa Analisis Tentang Pelaksanaan Otonomi Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Didesa Sanglar Kecamatan Durai

Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut :

Diharapkan kepada kepala desa dan pemerintah untuk memperkenalkan dan menjelaskan melalui sosialisasi mengenai Otonomi desa agar masyarakat lebih memahami dan mengetahuinya hal ini juga dapat membentuk masyarakat lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung dari bantuan pemerintah dan dapat menjaga rasa kekeluargaan dan nilai-nilai budaya yang ada didesa sanglar.

Kepada kepala desa dan pemerintah diharapkan bersama-sama membawa masyarakat untuk memanfaatkan pembangunan baik dibidang fisik, kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan, serta menjaga dan melestarikan SDA yang ada pada desa sanglar agar menjadi desa wisata.

Diharapkan kepada masyarakat lebih mengetahui dan memahami tentang otonomi desa agar tidak terlalu bergantung bantuan dari pemerintah dan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan SDA di desa sanglar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

<http://riedwaen.wordpress.com/2007/11/13/upaya-memperkuat-desa-merupakan-langkah-untuk-mempercepat-otonomi-desa/>

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2010/09/27/1501/memberdayakan-desa/#.TsO65-wZhnI>

katalog BPS : 1403.21.01.011.Kecamatan Durai

Hadi, sutrisno. *Metodologi Penelitian*, andi ofset: Jogjakarta

Nurlia, dwi.2011. *Analisis kelayakan pembentukankabupaten kepulauan meranti propinsi Riau berdasarkan PP No.78 tahun 2007.Skripsi.Universitas Riau.*

Marbun, B.N. 1980. *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga: Jakarta.

Widjaja,haw. 2010.*otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh.* Raja wali pers : Jakarta.